



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS
PELAYANAN MASYARAKAT PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BOGOR**

Periode 2010-2012

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Ipin Mahfudin

022109041

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

OKTOBER

2014

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS
PELAYANAN MASYARAKAT PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BOGOR**

Periode 2009-2012

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan,


(Dr. Hendro Sasongko, MM., Ak.)


(Dr. Yohanes Indrayono, MM., Drs., Ak.)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS
PELAYANAN MASYARAKAT PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BOGOR**

Periode 2009-2012

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

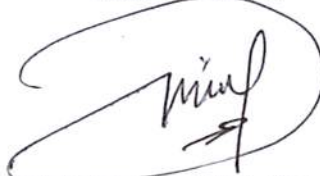
Pada Hari: Rabu, Tanggal: 29 Oktober 2014

Ipin Mahfudin

022109041

Menyetujui,

Dosen Penilai,



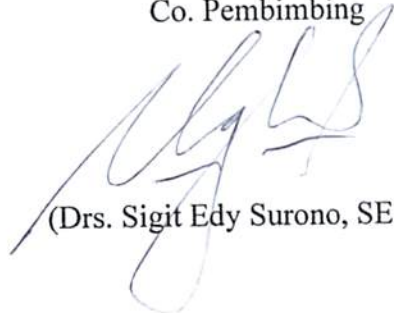
(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak.)



Pembimbing

(Dr. Hendro Sasongko, MM., Ak.)

Co. Pembimbing



(Drs. Sigit Edy Surono, SE., Ak.)

ABSTRAK

IPIN MAHFUDIN. NPM 022109041. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai Alat Untuk Mengukur Efektivitas Pelayanan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Dibawah Bimbingan : HENDRO SASONGKO dan SIGIT EDI SURONO.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam rangka pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dilaporkan tentang program-program yang dilaksanakan atau terealisasi sehingga dapat dievaluasi data tersebut sudah benar-benar mencerminkan pelayanan yang efektif dengan melihat target yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari literatur data yang dipublikasikan pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bogor. Data analisisnya dengan menggunakan laporan kinerja instansi pemerintah yang didapat kemudian melakukan penelaahan lebih lanjut dengan studi lapangan berupa wawancara dan teori teori yang ada guna mendapatkan hasil atau kesimpulan yang akurat.

Hasil dari penelitian ini bahwa Laporan Akuntabilitas Instansi pemerintah disusun dengan penetapan rencana kerja tahunan, dimana penyusunan rencana kerja tahunan tidak berdasarkan survey yang matang, salah satunya diukur dari perencanaan KTP yang tidak valid atau tidak matang. Hal tersebut dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil bahwa proses penetapan kinerja tahunan dalam menetapkan target yang akan capai tidak didasarkan pada rencana strategis. Pencapaian kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor menunjukkan pencapaian dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk tahun 2012 mencapai 200% dari target yang ditetapkan, sedangkan pelayanan E-KTP hanya mencapai 70% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dalam pembuatan E-KTP dapat dikatakan tidak optimal dan tidak efektif, dimana tidak mencapai target atau hanya mencapai 70% dari target yang telah ditetapkan. Dengan melihat kondisi tersebut ada beberapa hal yang menyebabkan pencapaian target pembuatan E-KTP tidak tercapai secara optimal diantaranya sumber daya manusia yang kurang memadai atau jumlahnya sedikit, peralatan yang digunakan jumlahnya terbatas, Proses pelaksanaan yang terlalu lama atau waktu mengantri terlalu lama. Sumber daya manusia yang kurang memadai atau jumlahnya sedikit itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelayanan yang diberikan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor perlu melakukan dan menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis dengan menggunakan survey yang matang atau bekerja sama dengan BPS untuk mendapatkan data yang valid, sehingga dalam penyusunan rencana strategis dapat terarah dan dapat menjadi pedoman yang baik untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif.

Kata Kunci : laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), rencana kinerja tahunan (RKT) dan *good governance*.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penyusunan skripsi yang berjudul “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sebagai Alat Untuk Mengukur Efektifitas Pelayanan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor” ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut membantu penyelesaian makalah ini, yakni :

1. Kedua orangtua tercinta, khususnya Ibunda atas segala dukungan dan motivasi tiada henti serta doa tulus yang Selalu mengiringi disetiap langkah.
2. Segenap keluarga terkasih yang selalu memberikan motivasi penuh hari demi hari.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, MM., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor, dan Selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekretaris dan koordinator Seminar Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
6. Bapak Drs. Sigit Edy Surono, SE., Ak., selaku Co. Dosen Pembimbing skripsi atas segala perhatian, saran, dan waktu yang telah dicurahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang selalu memberikan pengajaran, bimbingan dan membagi pengalaman selama saya kuliah.
8. Teman-teman B'act (Akuntansi B angkatan 2009) yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, atas dukungan dan kebersamaannya dari awal kuliah sampai saat ini.

9. Sahabat seperjuangan Mario, terimakasih atas segala kebersamaannya selama ini.
10. Teman terkasih Tenni Arum Widyawati, terimakasih atas segala dukungannya secara langsung dan tidak langsung.
11. Bapak dan Ibu Tata Usaha Universitas Pakuan Bogor yang telah membantu dalam pengurusan sidang, komprehensif, dan lainnya.
12. Semua pihak yang telah memberikan doa dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam makalah skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Bogor, Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian.....	5
1.5.1. Kerangka Pemikiran	5
1.5.2. Paradigma Penelitian	9
1.6. Hipotesis Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).....	11
2.1.1. Definisi LAKIP	12
2.1.2. Format LAKIP.....	12
2.1.3. Komponen LAKIP	14
2.1.3.1. Rencana Kinerja	14
2.1.3.1.1. Pengertian Rencana Kinerja	14
2.1.3.1.2. Langkah-langkah Penyusunan	15
2.1.3.1.3. Penyusunan Rencana Kinerja	16
2.1.3.2. Penetapan Kinerja	18
2.1.4. Karakteristik Laporan Kinerja Organisasi Sektor Publik	19
2.1.5. Fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	22
2.1.6. Analisis Informasi Laporan Kinerja	26
2.2. Efektifitas Pelayanan Publik	32
2.2.1. Definisi Efektifitas	32
2.2.2. Definisi Pelayanan	33
2.2.3. Definisi Efektifitas Pelayanan	34
2.2.4. Klasifikasi Pelayanan Publik	35
2.3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Alat Untuk Mengukur Efektifitas Pelayanan Publik.....	39
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	41
3.2. Metode Penelitian	41

3.2.1.	Desain Penelitian	41
3.2.1.1.	Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian	42
3.2.1.2.	Unit Analisis	43
3.2.2.	Operasional Variabel.....	43
3.2.3.	Prosedur Pengumpulan Data	44
3.2.4.	Metode Analisis	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Hasil Penelitian	46
4.1.1.	Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor.....	46
4.1.2.	Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang Disdukcapil Kabupaten Bogor	47
4.1.3.	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Disdukcapil Kabupaten Bogor	49
4.1.4.	Proses Penetapan Rencana Kinerja Tahunan	52
4.1.5.	Pengukuran Capaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Bogor.....	62
4.1.6.	Efektifitas Pelayanan	72
4.1.7.	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sebagai Alat Mengukur Efektifitas Pelayanan pada Disdukcapil Kabupaten Bogor	76
4.2.	Pembahasan dan Analisis	79
4.2.1.	Penyusunan Target Tahunan (RKT) pad Renstra Tidak Berdasarkan Survei yang matang.....	79
4.2.2.	Pelayanan dalam Pembuatan E-KTP yang tidak optimal dan tidak efektif.....	84
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Simpulan.....	86
5.2.	Saran	89

JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Operasional Variabel	44
Tabel 2 : Rencana Kinerja Tahunan 2010	55
Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahunan 2011	57
Tabel 4 : Rencana Kinerja Tahunan 2012	60
Tabel 5 : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2010	63
Tabel 6 : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011	65
Tabel 7 : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012	67
Tabel 8 : Pencapaian Sasaran Manajemen Pencatatan Sipil Disdukcapil	69
Tabel 9 : Pencapaian Kinerja Disdukcapil Tahun 2010-2012.....	73
Tabel 10: Persentase Pencapaian Kinerja Disdukcapil Tahun 2010-2012.....	77
Tabel 11: Rencana Strategis Disdukcapil 2009-2013	80
Tabel 12: Rencana Kinerja Tahunan Disdukcapil 2010-2012	81
Tabel 13: Pencapaian Kinerja Disdukcapil 2010-2012	83

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Paradigma Penelitian	9
Gambar 2 : Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Bogor	48
Gambar 3 : Proses Penetapan Rencana Kinerja Tahunan	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disertai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/LX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disempurnakan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/LX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dibangun dan dikembangkan dalam perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut di laporkan tentang program-program yang dilaksanakan atau terealisasi sehingga dapat dievaluasi data tersebut sudah benar-benar mencerminkan pelayanan yang efektif dengan melihat target yang telah di tetapkan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan membandingkannya dengan capaian kerjanya.

Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bogor adalah instansi Kabupaten Bogor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipil telah menyusun dan melaksanakan program serta sasaran yang dilakukan mulai dari masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang di terangkan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban di dalam kegiatan pelaksanaanya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian tentang sejauh mana kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bogor Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan judul “ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai Alat Untuk Mengukur Efektifitas Pelayanan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor ”

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Laporan Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil merupakan wujud pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja Dinas mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi dan misi, penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui pengukuran terhadap indikator kinerja (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) efisiensi dan efektifitas dari kegiatan-kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap pencapaian sasaran disimpulkan permasalahan dalam proses penelitian ini adalah untuk menilai apakah Program-program yang ditetapkan telah memberikan pelayanan yang efektif pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.

Dengan permasalahan tersebut maka penulis mengidentifikasi dan membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan Rencana Kinerja tahunan Pada dinas Kependudukan Dan catatan sipil Kabupaten Bogor ?
2. Bagaimana tingkat pencapaian Rencana kinerja Tahunan pada dinas Kependudukan Dan catatan sipil Kabupaten Bogor ?

3. Bagaimana Peranan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap Tingkat Pelayanan yang efektif pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Rencana kerja tahunan yang di jelaskan dalam program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga penulis dapat mengetahui fungsi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam mengukur tingkat efektifitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui proses penetapan kinerja tahunan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor
2. Untuk mengetahui tingkat Capaian kinerja berdasarkan Rencana Kerja Tahunan
3. Untuk mengetahui Peranan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap tingkat efektifitas pelayanan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat/kegunaan bagi :

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan akan fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terkait untuk memberikan pelayanan yang efektif pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu SKPD / Dinas pada pemerintah Kabupaten Bogor khususnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud dalam instruksi Presiden (*Inpres*) Nomor 7 tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholder yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP, dalam sistem AKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis penyusunan kinerja serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Sebagai tindak lanjut dari inpres nomor 7 tahun 1999 diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Media yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

LAKIP itu sendiri memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi, wujud tertulis pertanggungjawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, media akuntabilitas setiap instansi pemerintah merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya/pemberi wewenang yang akhirnya bermuara kepada presiden untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (*public accountability*), media informasi, tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip

good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan.

Tujuan dan Manfaat LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Efektifitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Menurut Richard M. Steers, (1985:20), berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan.

Menurut Chester I. Barnard (dalam Gibson, 1994:27), mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.

Menurut Sedarmayanti (2001:59), Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat

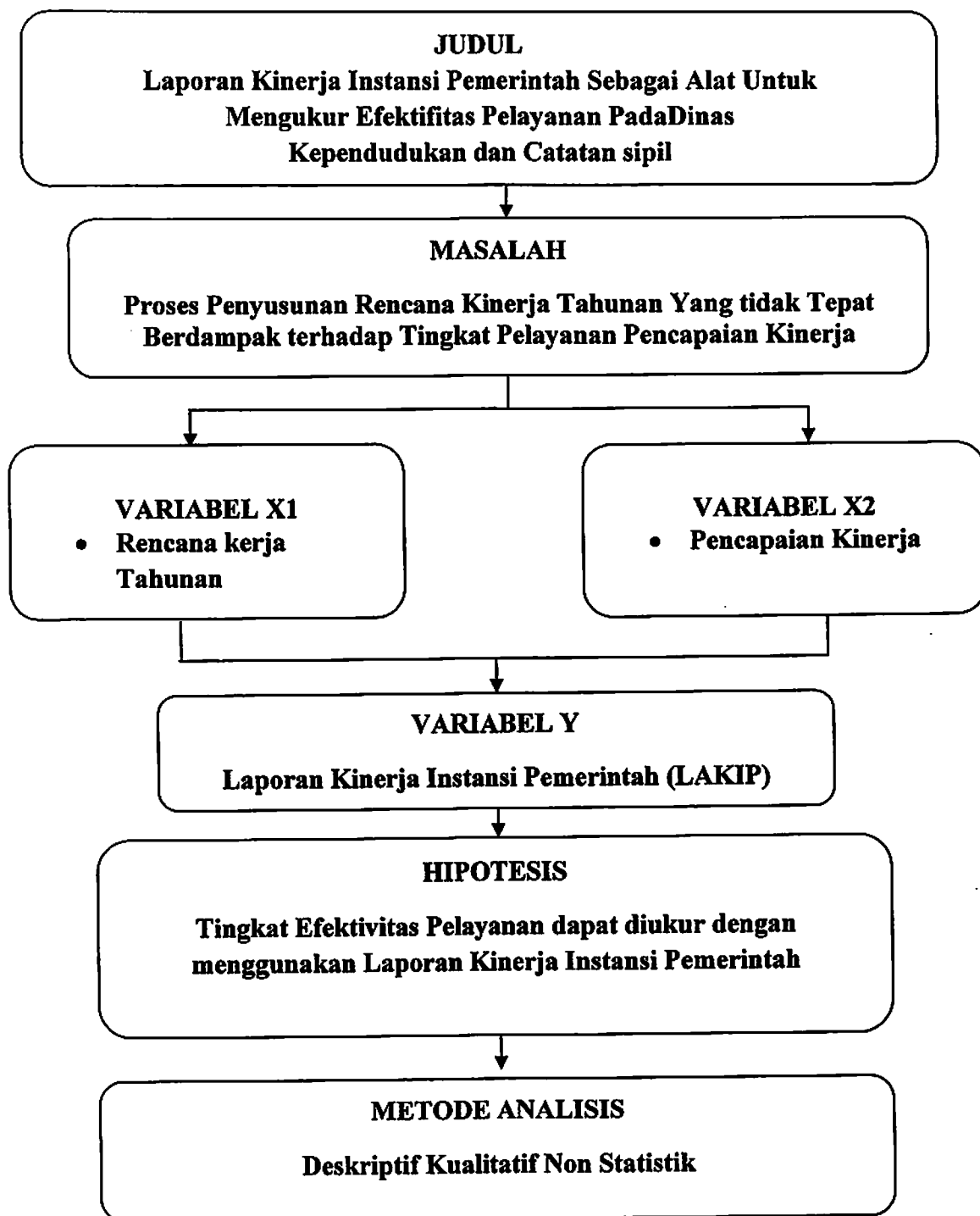
tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut Effendy (2003:14), Efektifitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Menurut Hadayaningrat (1996:16), Efektifitas adalah pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat Hadayaningrat mengartikan efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Dari bermacam-macam pendapat di atas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1.
PARADIGMA PENELITIAN

1.6. Hipotesis

Dari uraian tersebut diatas, penulis menghipotesiskan sementara sebagai berikut :

1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan sudah tepat dan Sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Pencapaian Kinerja sudah sesuai dengan target yang telah Ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah menggambarkan tingkat efektifitas pelayanan terhadap masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.1. Definisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut inpres nomor 7 tahun 1999 mengenai Pedoman penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan Sistem Akuntabilitas instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mengenai rancangan undang-pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan definisi dari “Laporan kinerja instansi pemerintah, yakni tambahan mengenai prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan”.

Menurut Fadel Muhammad (2008, 140) bahwa laporan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan sumber data yang

penting dalam merekam seluruh kegiatan pemerintah daerah selama kurun waktu tertentu, dimana salah satunya adalah laporan akuntabilitas instansi pemerintah.

Sedangkan menurut Deddi Nordian dan Ayuningtyas Hertianti (2010, 168) menjelaskan bahwa “Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta tujuan instansi pemerintah”.

Sehingga dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa laporan kinerja instansi pemerintah adalah suatu informasi sekaligus media pertanggungjawaban pengelolaan pemerintah baik dalam segi prestasi maupun informasi penting lain yang mencakup kesesuaian rencana dengan realisasi yang dilakukan.

Pengungkapan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan.

2.1.2. Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur objektif, akurat dan transparan.

Format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkan perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan. Menurut Deddi Nordian dan Ayuningtyas Hertianti (2010, 168) Format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri atas hal-hal berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh apa instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Bagian ini menyebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

2. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan hal-hal umum tentang instansi dan uraian singkat mandat yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi)

3. Rencana Strategis

Bagian ini menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan rencana kinerja, bagian awal pada bagian ini menyajikan gambaran singkat tentang sasaran yang ingin diraih

instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

4. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan kendala, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil secara sistematis.

5. Penutup

Penutup mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

6. Lampiran-lampiran

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, serta aspek lain dan data yang relevan hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi di muat dalam lampiran.

2.1.3. Komponen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2.1.3.1. Rencana Kinerja

2.1.3.1.1. Pengertian Rencana Kinerja

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik

2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

2.1.3.1.2. Langkah-langkah Penyusunan

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategik
2. Penelaahan Tugas dan Fungsi Organisasi
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun
4. Mengumpulkan data internal dan eksternal
5. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategik untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun
6. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, Outcomes)
7. Menentukan rencana kerja tingkat capaian (target) sasaran

8. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada rencana stratejik untuk dilaksanakan pada tahun rencana kerja yang disusun
9. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun
10. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts)
11. Menentukan satuan setiap indikator
12. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

2.1.3.1.3. Penyusunan Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana kinerja meliputi penyusunan sasaran (Uraian, Indikator, Dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Penetapan Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran man yang

akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya)

b. Penyusunan Program

Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Resntra. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Penyusunan Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya

d. Penyusunan Indikator Kinerja kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan

2.1.3.2. Penetapan Kinerja

Suatu Dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara bawahan dan atasan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi terkait.

Komponen penetapan Kinerja:

1. Sasaran Strategis

Suatu Outcome yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis

2. Indikator Kinerja

Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis

3. Target

Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data yang valid dan memadai.

4. Pengukuran Kinerja

Setiap akhir periode Instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja

2.1.4. Karakteristik pelaporan kinerja organisasi sektor publik Bentuk

Pemerintah dan organisasi-organisasi nonprofit mempunyai perbedaan dengan organisasi-organisasi lain yang bertujuan untuk mencari laba. Menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghozali (2001, 5) menjelaskan mengenai beberapa karakteristik dari organisasi yang bersifat nonprofit adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi nonprofit tidak mempunyai motif untuk mencari laba atau dengan kata lain motif mendapatkan keuntungan bukanlah tujuan utama bagi organisasi jenis ini.
- b. Organisasi nonprofit ini dimiliki secara kolektif, artinya adalah hak pemilikan tidak ditunjukkan oleh saham yang dapat dimiliki secara perorangan yang dapat dijualbelikan.
- c. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi nonprofit ini, tidak harus menerima imbalan langsung, baik berupa barang, uang atau jasa.

Menurut Indra Bastian (2006, 303) menjelaskan mengenai karakteristik pelaporan kinerja organisasi sektor publik yang berkualitas antara lain sebagai berikut :

- a. Fokus pada hal-hal yang penting

Dalam memenuhi akuntabilitas publik, pemerintah melaporkan kinerja secara detail. Berbagai fakta dilapangan yang penting dipilah sebelum pelaporan disusun, karena banyak hal yang penting sering mengaburkan fokus pelaporan. Kriteria kualitas informasi pelaporan yang dipercaya dan hanya menyajikan hal-hal

penting yang dapat dipilah menjadi tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mengetahui apa yang dianggap penting bagi user
2. Memuat informasi tentang tujuan utama pelaporan kinerja dan komitmen-komitmennya pada pencapaian hasil.
3. Memuat informasi yang dinilai penting oleh organisasi sektor publik dari aspek kinerja.

b. Menghubungkan tujuan dengan hasil

Agar lebih berkualitas, pelaporan kinerja seyogyanya mengandung penjelasan tentang tujuan dan sasaran yang dihubungkan dengan hasil yang telah dicapai. Pelaporan kinerja harus memuat :

1. Kerangka informasi mengenai hal-hal yang sedang dilakukan organisasi sektor publik dan apa yang telah dicapai
2. penghargaan kesuksesan dan budaya belajar secara berkelanjutan untuk melakukan perbaikan
3. diskusi publik, partipasi kebijakan publik, dan proses pengalokasian sumber daya, membantu manajemen sektor publik untuk mengetahui apa dan bagaimana mengkomunikasikan program yang dicoba untuk dilakukan.
4. membangun pemahaman publik atas pelaporan kinerja yang dibuat, kepercayaan publik perlu dimunculkan atas arah kebijakan dan harapan yang akan diraih.

c. Menyajikan hasil sesuai dengan konteksnya

Pelaporan kinerja harus menyajikan faktor kontekstual dari institusi atau program yang dilaporkan, termasuk lingkungan di mana organisasi itu beroperasi, faktor krusial keputusan arah yang dibuat, arah kebijakan, sasaran-sasaran dan strategi pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai.

d. Mengaitkan sumber daya dengan hasil

Pengambilan keputusan program harus memperhatikan hasil yang ingin dicapai dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan. Selain itu, strategi yang ditentukan juga harus meliputi apa yang diterapkan untuk mencapai tingkat hasil tertentu. Penjelasan atas strategi pencapaian tujuan akan meliputi bagaimana organisasi sektor publik mencapai sasaran programnya, mengalokasikan sumber daya, dan membantu memahami hubungan sebab-akibat serta asumsi-asumsi yang digunakan.

e. Menyajikan informasi yang bersifat komparatif

Selain perbandingan realisasi dan anggaran, ada dua faktor perbandingan yang dapat dipertimbangkan, yaitu hasil kegiatan sebelumnya dan hasil kegiatan dari organisasi sejenis.

f. Mempertimbangkan faktor keandalan/reliabilitas

Faktor yang menentukan reliabilitas pelaporan kinerja adalah kinerja organisasi pelayanan publik, pilihan metode pengukuran kinerja yang dipakai, dan analisis cost effectiveness dari pendekatan alternatif yang tersedia.

2.1.5. Fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam laporan kinerja instansi pemerintah terdapat suatu anggaran yang digunakan dalam penyusunan suatu laporan. Fungsi laporan kinerja instansi pemerintah tidak jauh berbeda dengan suatu fungsi anggaran dalam sektor publik.

Fungsi anggaran sektor publik antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai alat perencanaan.

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan untuk :

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan,
- c. Mengalokasikan danan pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Sebagai alat pengendalian ,

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran (*missappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Selain itu, anggaran dapat digunakan untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

3. Sebagai alat kebijakan fiskal,

Anggaran sebagai kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Sebagai alat politik,

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen

eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi,

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat komunikasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Sebagai penilaian kinerja,

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Sebagai alat motivasi, dan

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Sebagai alat menciptakan ruang publik.

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD, masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai

organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.

Menurut Deddi Nordian dan Ayuningtyas Hertianti (2010, 159) mengemukakan mengenai tujuan penilaian kinerja dari akuntansi sektor publik atau pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja organisasi berfungsi sebagai tonggak (milestone) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan dengan cepat.

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi serta mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkan terhadap tujuan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran tentang cara mereka seharusnya bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill,

atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

3. **Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya**

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi (achievement culture) di dalam organisasi..

4. **Memberikan pertimbangan sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment)**

Pengukuran kinerja bertujuan untuk memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward (Misalnya kenaikan gaji, tunjangan dan promosi) atau punishment (Misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran).

5. **Memotivasi pegawai**

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai, dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

2.1.6. Analisis Informasi Laporan Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Data pengukuran kinerja seharusnya dapat digunakan untuk

peningkatan program. Setelah sebuah organisasi mengumpulkan seluruh data pengujian dan analisis data lalu dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Indra Bastian, (2006, 331) bahwa analisis data dari sistem pengukuran kinerja yang baik dapat membantu organisasi dalam :

- a. Mengidentifikasi kondisi pelaksanaan program yang mendorong perbaikan program.
- b. Membantu pengembangan dan peningkatan strategi pelayanan.
- c. Menyediakan petunjuk permasalahan dan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan hasil.
- d. Membantu penilaian tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Selain itu, menurut Indra Bastian, (2006, 331), menyebutkan bahwa terdapat beberapa prosedur yang disarankan untuk pengujian secara sistematis yang terdiri dari :

1. Pengujian perubahan sepanjang waktu
2. Pengujian breakout hasil bagi setiap indikator hasil yang perlu dilakukan untuk menilai dimana kinerja dilakukan secara baik dan adil atau buruk.
3. Membandingkan hasil program dengan hasil-hasil program serupa di organisasi yang berbeda.
4. Menggunakan prinsip pengecualian, yaitu toleransi melalui penjelasan hasil indikator kinerja di luar jangkuan target.
5. Mendapatkan dan menguji penjelasan informasi.

6. Menentukan apakah data pada banyak tipe indikator kinerja adalah konsisten.
7. Fokuskan pada setiap individu yang berada di rentang indikator hasil.
8. Menguji hasil ganda bersama untuk mendapatkan perspektif yang lebih menyeluruh atas kinerja secara keseluruhan.
9. Penggunaan data kinerja yang lalu untuk tindakan yang cepat bagi prosedur baru untuk membantu mengevaluasi keberhasilan program.

Selain mengukur suatu kinerja instansi pemerintah melalui laporan kinerja instansi pemerintah, pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah pada dasarnya dilaporkan juga melalui laporan akuntansi. Laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan, terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan akuntansi ini dinamakan laporan keuangan.

Menurut Hery, S.E., M.Si (2012, 3), mendefinisikan terkait dengan laporan keuangan yaitu: "Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Selain itu, menurut Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 (2007, 09) bahwa "laporan keuangan merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Sedangkan menurut Soemarso S.R. (2005, 34) yaitu: “Laporan keuangan atau *financial statement* merupakan laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan”.

Dengan demikian, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan, hasil suatu usaha entitas atau transaksi-transaksi oleh suatu entitas pelaporan yang digunakan sebagai alat mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam suatu pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, terdapat beberapa komponen pelaporan suatu instansi pemerintahan. Menurut I Gusti Agung Rai (2008, 16) Pelaporan merupakan salah satu saran akuntabilitas suatu organisasi publik atau instansi pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

“Akuntansi pemerintah di bidang keuangan diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, akuntabilitas pemerintah di bidang kinerja diwujudkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBN/APBD”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan No.1 (2007, 14), komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan pokok adalah sebagai berikut :

a. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas dalam tanggal tertentu dan laporan ini merupakan laporan yang tidak pernah terpisahkan dalam akuntansi keuangan.

c. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

d. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut Indra Bastian (2007, 86) terkait dengan komponen dalam laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

- a. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva

bersih serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

- b. Laporan aktivitas adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah serta sifat aktiva bersih, hubungan antara transaksi dan bagaimana sumber daya digunakan dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Dimana dalam laporan aktivitas mencakup perubahan kelompok aset bersih, informasi mengenai pendapatan dan beban, dan informasi mengenai pemberian jasa.
- c. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode.

Menurut Indra Bastian (2007, 74) adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai :

- a. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih suatu yayasan atau organisasi
- b. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah sifat serta nilai aktiva bersih.
- c. Jenis dan jumlah arus masuk serta arus kas keluar sumber daya selama satu periode dan hubungannya di antara keduanya.
- d. Cara suatu yayasan mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap likuiditasnya.
- e. Usaha jasa suatu yayasan atau organisasi.

2.2. Efektivitas Pelayanan Publik

2.2.1. Definisi Efektivitas .

Efektivitas kerap kali di gunakan oleh perusahaan dalam menilai tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Hans Kartikahadi dalam buku Sukrisno Agoes (2012: 167), pengertian efektivitas dapat diuraikan sebagai berikut:

“Efektivitas dimaksud bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan”.

Menurut Deddi Nordian dan Ayuningtyas Hertianti (2010, 161) mendefinisikan bahwa “Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan di mana ukuran efektivitas merupakan refleksi output”.

Sedangkan menurut Indra Bastian, (2006, 280) mendefinisikan bahwa “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan”.

Selain itu, menurut Cook dan Winkle dalam buku Sukrisno Agoes (2012: 168): “*Effectivity, if the achieved benefits are in accordance with the program's preestablished goals*”.

Dengan demikian, Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan.

2.2.2. Definisi Pelayanan

Menurut Haryatmoko, (2007, 73) Definisi “Pelayanan publik ialah semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah karena pemenuhannya diperlukan untuk pewujudan dan perkembangan kesalingtergantungan sosial dan pada hakikatnya, perwujudannya sulit tanpa campur tangan kekuatan pemerintah”.

Menurut Hanif Nurcholis (2007, 289) “Pelayanan publik berasal bahasa Inggris, yaitu *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. yang berarti umum misalnya *public of fering* (penawaran umum), yang berarti masyarakat misalnya *public relation* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat) dan yang berarti negara misalnya *public authorities* (otoritas negara). pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori publik bukan sektor privat. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat”.

Sedangkan menurut Payaman J Simanjuntak (2011, 195) menjelaskan bahwa “Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau oleh pihak swasta atas pendelegasian pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan dapat diperoleh oleh masyarakat umum tanpa perbedaan atau diskriminasi.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pelayanan yang kegiatan pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat umum atau menyediakan kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3. Definisi Efektivitas Pelayanan

Dapat disimpulkan bahwa definisi efektivitas menurut Sukrisno Agoes (2012, 167) yaitu: “Efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja, kualitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan”

Dan menurut IBK Bhayangkara dalam bukunya Audit Manajemen prosedur dan implementasi (2008:14) menyatakan bahwa efektivitas adalah: “Tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya”

Sedangkan pelayanan publik adalah pelayanan yang kegiatan pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat umum atau menyediakan kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga efektivitas pelayanan publik merupakan tingkat keberhasilan pemerintah untuk memberikan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga pengukuran efektivitas pelayanan publik adalah sejauh mana pemerintah berhasil tidaknya memberikan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4. Klasifikasi Pelayanan Publik

Menurut Payaman J Simanjuntak (2011, 195) Pelayanan publik dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Pelayanan yang memang menjadi kewenangan pemerintah seperti memberikan izin dan menerbitkan peraturan, menerbitkan akta dan melakukan akreditasi
- b. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah karena swasta tidak tertarik, tidak mampu atau tidak cukup menyediakannya seperti menyediakan prasarana jalan, angkutan umum, sekolah-sekolah, pelayanan kesehatan, air minum dan perumahan

Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah baik karena sudah merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah untuk melakukannya, maupun karena masyarakat tidak tertarik untuk melakukannya, pelayanan publik dapat berupa :

- a. Penerbitan surat identitas dan akta
- b. Penerbitan izin dan akreditasi
- c. Pelayanan transportasi dan komunikasi
- d. Pelayanan kesehatan
- e. Pelayanan pendidikan
- f. Pelayanan air minum dan tenaga listrik
- g. Pelayanan sanitasi dan pembuangan sampah
- h. Pelayanan perumahan dan pemadam kebakaran
- i. Pelayanan penguburan

Salah satu pelayanan publik dijelaskan adanya pelayanan dalam hal penerbitan surat identitas dan akte, surat identitas dan akte diterbitkan untuk kepentingan individu yang bersangkutan dan untuk kepentingan pemerintah. Menyangkut kepentingan individu terdiri dari identitas diri dan pemilikan individu, salah satu contoh identitas diri adalah kartu tanda penduduk dan paspor, sedangkan contoh kepemilikan individu adalah ijazah, sertifikat tanah, dan hak paten.

Sedangkan pemerintah menerbitkan berbagai jenis akte bukan karena kebutuhan oleh individu yang bersangkutan, akan tetapi terutama untuk kepentingan pemerintah sendiri, supaya pemerintah memiliki data yang akurat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Akte kelahiran
- b. Akte atau surat perkawinan
- c. Buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)
- d. Akte yayasan dan akte perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2009, 107) menjelaskan bahwa “pemberian pelayanan publik pada dasarnya dibiayai melalui dua sumber yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik (*Charging for service*)”.

Dan Menurut Mardiasmo (2009, 107) terdapat beberapa “pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan yaitu :

1. Penyediaan air bersih
2. Transportasi publik
3. Jasa pos dan telekomunikasi
4. Energi dan listrik
5. Perumahan rakyat
6. Fasilitas rekreasi (pariwisata)
7. Pendidikan
8. Jalan tol

Selain itu, Menurut Mohamad mahsun (2007, 6) beberapa tipe pelayanan publik dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. *Pure publik goods*

Pure publik goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama.

2. *Quasi publik goods*

Quasi publik goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut.

3. *Quasi private goods*

Quasi private goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang dan jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

4. *Pure private goods*

Pure private goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya dan yang tidak membelinya tidak dapat menikmati jasa atau barang tersebut.

2.3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Alat Untuk Mengukur Efektivitas Pelayanan Publik

Sesuai dengan definisi laporan kinerja instansi pemerintah menurut Deddi Nordian dan Ayuningtyas Hertianti (2010, 168) bahwa "Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) menyajikan uraian tentang kinerja

instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta tujuan instansi pemerintah”.

Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa laporan instansi pemerintah mencakup penjelasan dan uraian tentang kinerja dalam hal memberikan pelayanan publik serta informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah.

Terdapat suatu untuk pengukuran efektivitas pelayanan publik pada suatu laporan kinerja instansi pemerintah, karena didalamnya mencakup capaian kinerja instansi pemerintah maupun pelayanan publik yang telah direalisasi. Sehingga laporan kinerja instansi pemerintah menunjukkan tingkat efektivitas suatu pelayanan publik yang mana menurut pendapat Islahuzzaman (2012, 132) bahwa Efektivitas adalah berdayaguna. Kemampuan suatu unit untuk mencapai atau melampaui sasaran, target, atau tujuan yang diinginkan (yang telah ditetapkan lebih dahulu). Efektivitas menggambarkan hubungan suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang dicapai. Berapa masukan (*input*) yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran (*output*).

Hal tersebut menjelaskan bahwa efektivitas lebih dititikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi (sampai sejauh mana organisasi dapat dikatakan berhasil) dalam usaha mencapai sasaran yang telah dipilih, Semakin tinggi tingkat keberhasilan suatu organisasi terhadap nilai pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan instansi atau organisasi tersebut semakin efektif.

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintahan, selain dilihat melalui kinerja yaitu melalui laporan kinerja instansi pemerintah, tentu pula terdapat suatu laporan di bidang keuangan yang menunjukkan sejauh mana pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada pengguna sumber daya, dimana menurut Lili M Sadeli (2009, 18) Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, tujuan suatu laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2012, 5) bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi perusahaan, dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Dimana suatu informasi dalam laporan keuangan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi sejauh mana efektivitas penggunaan sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilihat dari sudut angka-angka satuan moneter.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa laporan kinerja instansi pemerintah dan suatu informasi laporan keuangan adalah suatu informasi sekaligus media pertanggungjawaban pengelolaan pemerintah serta suatu alat untuk mengukur tingkat efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam hal mencapai kesejahteraan masyarakat.

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sebagai Alat Untuk Mengukur Efektivitas Pelayanan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bogor Variabel pertama adalah Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Pencapaian Kinerja sebagai variabel independen (*independent variable*), sedangkan variabel kedua adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai variabel dependen (*dependent variable*). Untuk mendapatkan data yang memadai, penulis melakukan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan cara yang sistematis dan terorganisir, sehingga masalah yang diteliti diselesaikan dengan efektif, efisien dan ekonomis. Dengan demikian hendaknya setiap penelitian yang dilakukan harus didesain terlebih dahulu mengenai cara atau urutan langkah yang akan dikerjakan untuk memperoleh hasil yang efektif, efisien dan ekonomis atas penelitian tersebut. Penulis menggunakan desain penelitian yang mencakup:

3.2.1.1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif (*eksploratif*), yaitu suatu variabel yang menjelaskan dan menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fakta dan fenomena yang diamati secara sistematis dan faktual serta akurat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan studi kasus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Metode ini melakukan penilaian tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan latar belakang dan kondisi atau suatu fase atau khas dari keseluruhan personalitas untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.

3. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif, (nonstatistik) yaitu teknik penelitian secara alamiah dalam situasi normal dan menekankan pada deskripsi secara alami. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan perilaku factor penyebab.

3.2.1.2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/perusahaan yaitu berupa laporan kinerja instansi pemerintah pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bogor.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan untuk variabel bekerja, dan menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya.

Tipe-tipe variabel yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Adapun yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) dalam penulisan ini adalah Rencana Kinerja dan Pencapaian Kinerja.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent variable*). Dalam penulisan ini, yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sebagai Alat
Untuk Mengukur Efektifitas Pelayanan Masyarakat pada
Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
Kabupaten Bogor**

No	Variabel / Sub Variabel	Indikator	Skala
1	Variabel (X1) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Variabel (X2) Pencapaian Kinerja	Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio
2	Variabel (Y) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Target Realisasi	Rasio

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel

3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun makalah ini adalah dengan melalui beberapa jenis, yaitu dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai efektivitas pelayanan.

2. Studi Lapangan

Wawancara

Pengumpulan data dengan cara mengadakan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan data dan keterangan yang akurat yang

dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah pada bagian catatan kependudukan dan catatan sipil serta beberapa pihak yang terkait dalam perusahaan yang dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan operasional dinas sehari-hari.

3.2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif (nonstatistik), yaitu setelah data dikumpulkan, maka data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang ada. Dengan demikian akan diketahui bagaimana laporan kinerja instansi pemerintah berperan dalam mengukur efektivitas pelayanan pada dinas kependudukan dan catatan sipil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

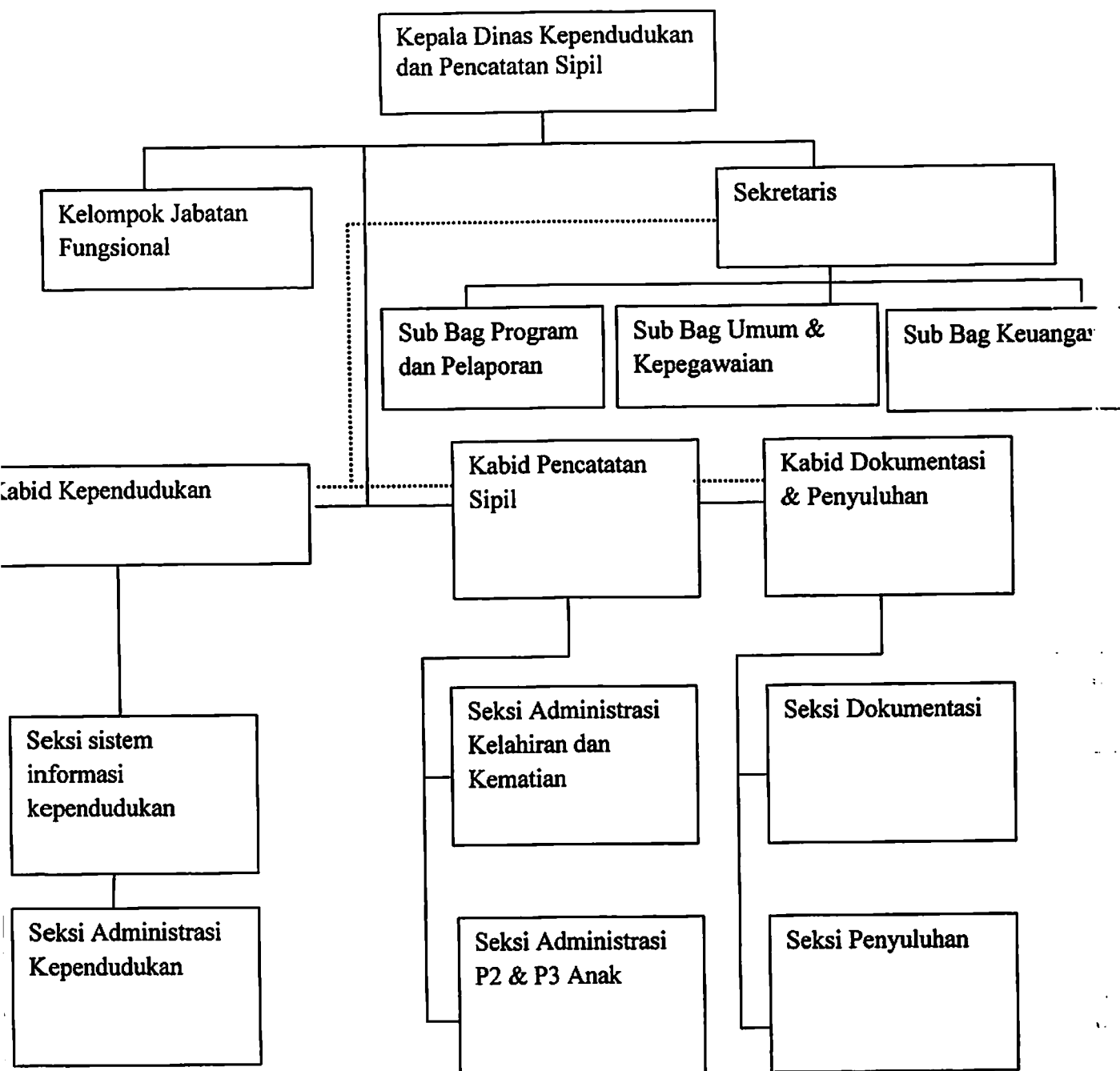
4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan intruksi presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi tahun 2010, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada pimpinan di kabupaten bogor yaitu bupati Bogor.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tingkat sasaran menggunakan indikator utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai daftar pengesahan anggaran (DPA) dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tahun 2011.

4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas, Dan Wewenang Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor



Gambar 2.
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bogor

Berdasarkan struktur organisasi sebelumnya, maka dapat dijelaskan uraian kedudukan dan tugas pokok sesuai dengan posisinya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.1.3. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini adalah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan suatu pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yaitu satu tahun sekali pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor memiliki suatu dasar hukum yang mengatur, berikut ini dasar hukum dalam penyusunan laporan kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor yaitu :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme.
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme.
3. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1996 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
4. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan

penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Peraturan daerah Kabupaten Bogor nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan dewan perwakilan rakyat.
7. Peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pemerintah kabupaten bogor tahun 2008 sampai 2013.
8. Peraturan daerah nomor 16 tahun 2011 tentang perubahan perda nomor 7 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten bogor tahun 2008 sampai tahun 2013.

Menurut instruksi presiden No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif, atau lebih jelasnya lagi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2009, tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Bogor tahun 2012-2013, visi kabupaten bogor yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Bertaqwa, Berdaya dan Berbudaya Menuju Sejahtera”.

Berkenaan dengan perubahan RPJMD kabupaten bogor tahun 2008-2013 yang ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten bogor nomor 16 tahun 2011 dalam rangka mendukung pelaksanaan visi tersebut, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor sesuai dengan tugas dan fungsi dinas, maka ditetapkan visi dinas sebagai berikut “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan”.

Misi adalah penjabaran secara konkrit dan visi yang harus dilaksanakan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik, sedangkan menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional, misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor menetapkan misi tahun 2009 sampai 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen perkantoran.
2. Meningkatkan manajemen pelayanan dokumen kependudukan.
3. Meningkatkan manajemen pencatatan sipil.

Ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berikut ini tujuan dan sasaran rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi.

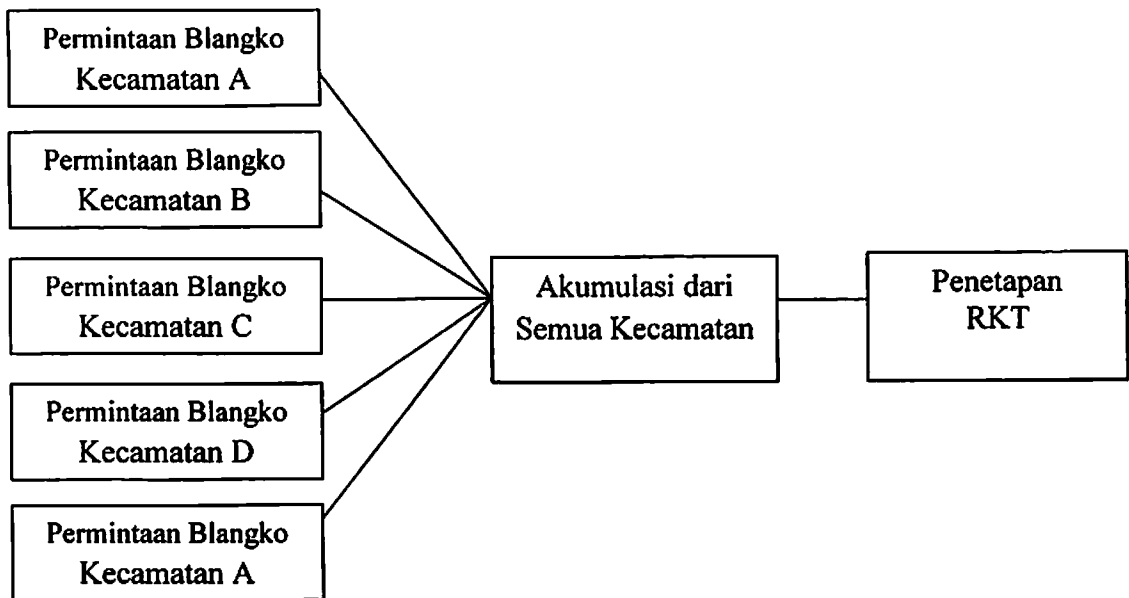
- c. Meningkatkan penataan arsip dinas.
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur dibidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e. Meningkatkan layanan jaringan.
- f. Meningkatkan layanan masyarakat.
- g. Melaksanakan pendataan masyarakat.

Sedangkan sasaran rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

4.1.4. Proses Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan wawancara pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor bahwa penetapan rencana kerja tahunan (RKT) di tetapkan berdasarkan permintaan belangko dari setiap kecamatan yang kemudian diakumulasikan dari seluruh kecamatan dan hasil dari akumulasi tersebut dijadikan sebagai penetapan kinerja tahunan (RKT)



Gambar 3.
Proses Penetapan Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan pemaparan diagram diatas bahwa data yang diperoleh dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dengan mengakumulasi permintaan blangko dari seluruh kecamatan yang ada di kabupaten bogor yaitu berjumlah 46 kecamatan yang kemudian diakumulasikan dan dijadikan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sedangkan dilihat dari Rencana kinerja tahunan (RKT) Tahun 2011 dinas kependudukan dan pencatatan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2008-2013, maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT) dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2010. Rencana Kinerja Tahunan dinas

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2010 semula disusun dengan berpedoman pada surat keputusan kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun dengan adanya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka RKT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2010 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menetapkan Target Kinerjanya berdasarkan permintaan formulir / belangko dari tiap-tiap masing kecamatan di seluruh kabupaten Bogor yang kemudian diakumulasikan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Secara lengkap rencana kinerja tahunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

**Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor Tahun 2010**

Kegiatan			
Uraian	Indikator	Satuan	Target
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Input : Dana dan SDM	Rp	526.193.000
	Output : Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tersedia		
	KTP	Lembar	619.515
	KK	Lembar	420.470
	SKTT	Lembar	657

	Surat Keterangan Pindah Datang	Lembar	13.136
	Outcome : Meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dalam,		
	KTP	Lembar	619.515
	KK	Lembar	420.470
	SKTT	Lembar	657
	Surat Keterangan Pindah Datang	Lembar	13.136
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kelahiran dan Kematian	Input : Dana dan SDM	Rp	419.867.000
	Output : Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	Akta	85.000
	Outcome : meningkatkan administrasi pencatatan sipil	Akta	85.000

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bogor, Data diolah penulis)

Tabel. 2
Rencana Kinerja Tahunan 2010

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor menentukan rencana kinerja tahunan untuk tahun 2010, dimana dalam penataan dinas administrasi khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor membutuhkan input berupa dana sebesar Rp 526.193.000 dengan jumlah dokumen terdaftar yang tersedia untuk kartu identitas penduduk sebesar 619.515 lembar, kartu keluarga sebanyak 420.470 lembar, SKTT sebanyak 657 lembar dan surat keterangan pindah datang sebanyak 13.136 lembar sehingga dapat meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dalam pembuatan kartu penduduk, kartu keluarga, SKTT dan surat keterangan pindah/datang.

Sedangkan dilihat dari rencana dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang

administrasi kelahiran dan kematian membutuhkan masukan berupa dana sebesar Rp 419.867.000 dengan harapan dapat meningkatkan jumlah akte kelahiran yang diterbitkan, dimana rencana dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor dalam bidang administrasi kelahiran dan kematian adalah sebanyak 85.000 lembar pada tahun 2010. Sehingga rencana kinerja tahunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor merupakan suatu Penetapan Kinerja yang telah direncanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2010.

Selain itu, berikut ini disajikan terkait dengan rencana kinerja tahunan yang disusun oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2011. Dimana rencana kinerja tahunan tahun 2011, disusun dengan melihat dari rencana kinerja tahun 2010 sekaligus mengukur realisasi pencapaian kinerja tahun 2010, sehingga hasil evaluasi tersebut dijadikan tolak ukur dalam penyusunan rencana kinerja tahun 2011. Berikut ini rencana kinerja tahunan 2011 dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor yaitu :

**Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor Tahun 2011**

Kegiatan			
Uraian	Indikator	Satuan	Target
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	kependudukan secara terpadu		
	Input : Dana dan SDM	Rp	350.000.000
	Output : Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tersedia		
	KTP	Lembar	540.000
	KK	Lembar	312.000

	SKTT	Lembar	600
	Surat Keterangan Pindah Datang	Lembar	24.000
	Outcome : Meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dalam,		
	KTP	Lembar	540.000
	KK	Lembar	312.000
	SKTT	Lembar	600
	Surat Keterangan Pindah Datang	Lembar	24.000
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kelahiran dan Kematian	Input : Dana dan SDM	Rp	50.000.000
	Output : Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	Akta	50.000
	Outcome : meningkatkan administrasi pencatatan sipil	Akta	50.000

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bogor, Data diolah penulis)

Tabel 3.
Rencana Kinerja Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor menentukan rencana kinerja tahunan untuk tahun 2011, dimana dalam penataan dinas administrasi khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor membutuhkan input berupa dana sebesar Rp350.000.000 dengan jumlah dokumen terdaftar yang tersedia untuk kartu identitas penduduk sebesar 540.000 lembar, kartu keluarga sebanyak 312.000 lembar, SKTT sebanyak 600 lembar dan surat keterangan pindah datang sebanyak 24.000 lembar sehingga dapat meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dalam pembuatan kartu penduduk, kartu keluarga, SKTT dan surat keterangan pindah/datang.

Sedangkan dilihat dari rencana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam peningkatan pelayanan publik dalam bidang administrasi kelahiran dan kematian membutuhkan masukan berupa dana sebesar Rp 50.000.000 dengan harapan dapat meningkatkan jumlah akte kelahiran yang diterbitkan.

Menindaklanjuti inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2011 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani sekretaris daerah dan diketahui bupati bogor. Tapkin dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2011 disusun berdasarkan surat edaran menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja. Tapkin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Tapkin dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor 2011 disusun sesuai dengan DPA dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor 2011 dan dilakukan perubahan sesuai DPA dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor 2011 perubahan.

Tapkin dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya, indikator outputs berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai

dengan DPA dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2011.

Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2011, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2011, tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan dengan jumlah sebesar Rp 6.363.090.000

Selain itu, berikut ini disajikan terkait dengan rencana kinerja tahunan yang disusun oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2012. Dimana rencana kinerja tahunan tahun 2012, disusun dengan melihat dari rencana kinerja tahun 2011 sekaligus mengukur realisasi pencapaian kinerja tahun 2011, sehingga hasil evaluasi tersebut dijadikan tolak ukur dalam penyusunan rencana kinerja tahun 2012. Berikut ini rencana kinerja tahunan 2012 dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor yaitu :

**Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor Tahun 2012**

Kegiatan			
Uraian	Indikator	Satuan	Target
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	kependudukan secara terpadu		
	Input : Dana dan SDM	Lembar	11.275.203.000
	Output : Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tersedia		
	KTP	Lembar	363.012
	E – KTP	Lembar	3.459.297
	KK	Lembar	617.846
	SKTT	Lembar	785
	Surat Keterangan Pindah Datang	Lembar	36.000

	Outcome : Meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dalam,		
	KTP	Lembar	363.012
	E - KTP		3.459.297
	KK	Lembar	617.846
	SKTT	Lembar	785
	Surat Keterangan Pindah Datang	Lembar	36.000
	Input : Dana dan SDM	Orang	50.000.000
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kelahiran dan Kematian	Output : Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	Akta	30.000
	Outcome : meningkatkan administrasi pencatatan sipil	akta	30.000

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bogor, Data diolah penulis)

Tabel 4.
Rencana Kinerja Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor menentukan rencana kinerja tahunan untuk tahun 2012, dimana dalam penataan dinas administrasi khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor membutuhkan input berupa dana sebesar Rp 11.275.203.000 dengan jumlah dokumen terdaftar yang tersedia untuk kartu identitas penduduk sebesar 363.012 lembar, rencana untuk kartu identitas penduduk pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 540.000 lembar. Akan tetapi, tahun 2012 terdapat perbaikan dengan diberlakukannya Elektronik kartu tanda penduduk atau sering disebut dengan (E-KTP), dimana tahun 2012 dinas kependudukan dan pencatatan sipil E- KTP sebanyak 3.459.297 lembar, kartu keluarga sebanyak 312.000 lembar, SKTT sebanyak

600 lembar dan surat keterangan pindah datang sebanyak 24.000 lembar sehingga dapat meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dalam pembuatan kartu penduduk, kartu keluarga, SKTT dan surat keterangan pindah/datang.

Sedangkan dilihat dari rencana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam peningkatan pelayanan publik dalam bidang administrasi kelahiran dan kematian membutuhkan masukan berupa dana sebesar Rp 50.000.000 dengan harapan dapat meningkatkan jumlah akte kelahiran yang diterbitkan.

Menindaklanjuti inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2011 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani sekretaris daerah dan diketahui bupati bogor. Tapkin dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2011 disusun berdasarkan surat edaran menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja. Tapkin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Tapkin dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor 2011 disusun sesuai dengan DPA dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor 2011 dan dilakukan perubahan sesuai DPA dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor 2011 perubahan.

4.1.5. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2011 dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sasaran sesuai dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja kegiatan sesuai dengan surat keputusan kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2011 disajikan dalam lampiran 3, dan pengukuran kinerja kegiatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2011 disajikan sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Tahun 2010

Kegiatan					
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	kependudukan secara terpadu				
	Input : Dana dan SDM	Lembar	526,193,000	523,235,250	99%
	Output : Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tersedia				
	KTP	Lembar	619,515	3,838,080	620%

	KK	Lembar	420,470	200,750	48%
	SKTT	Lembar	657	578	88%
	Surat Keterangan Pindah Cabang	Lembar	13,136	21,009	160%
	Outcome : Meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dalam,				
	KTP	Lembar	619,515	3,838,080	620%
	KK	Lembar	420,470	200,750	48%
	SKTT	Lembar	657	578	88%
	Surat Keterangan Pindah datang	Lembar	13,136	21,009	160%
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kelahiran dan Kematian	Input : Dana dan SDM	Orang	419,867,000	416,394,000	99%
	Output : Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	Akta	85,000	141,500	166%
	Outcome : meningkatkan administrasi pencatatan sipil	Akta	85,000	141,500	166%

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bogor, Data diolah penulis)

Tabel 5.
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengukuran capaian kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor apabila diukur dari Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan, menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor membutuhkan input berupa dana sebesar Rp350.000.000.000 dengan realisasi sebesar 99% atau hampir menggunakan dana sesuai dengan rencana dana yang ditetapkan, sedangkan dari segi pencapaian kinerja menunjukkan bahwa hasil pencapaian untuk kartu tanda penduduk yang dicapai sebesar hanya sebanyak 3,838,080 lembar atau hanya sebesar 620%, kartu keluarga dengan realisasi sebesar 48% atau tidak mencapai target yang ditetapkan, SKTT hanya sebanyak 88% atau hanya sebanyak 578 lembar dan surat

keterangan pindah datang sebanyak 21,009 lembar atau sebesar 160% pada tahun 2010. Dengan hasil yang dicapai, diharapkan dapat meningkatkan peran serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor untuk dapat meningkatkan kembali administrasi pendaftaran penduduk dalam pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan pindah.

Upaya dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam peningkatan pelayanan public dalam bidang administrasi kelahiran dan kematian membutuhkan masukan berupa dana sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 50.000.0000 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan, serta dengan pencapaian kinerja sebesar 351% atau mencapai 175.550 akta yang dibuat. Serta dalam upaya peningkatan pelayanan public dalam bidang administrasi perkawinan, perceraian, dan pengakuan pengesahan, dan pengangkatan anak membutuhkan dana sebesar Rp 23.994.000 dengan realisasi sebesar 100% serta jumlah akta sebesar 400 yang ditargetkan dengan realisasi sebesar 114% atau sebanyak 454 akta yang dibuat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor.

**Pengukuran Kinerja Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor Tahun 2011**

Kegiatan						
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	(%)	
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Input : Dana dan SDM	Lembar	350,000,000,000	344,483,000,000	98%	
	Output : Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tersedia					
	KTP	Lembar	540,000	592,648	110%	
	KK	Lembar	312,010	302,010	97%	
	SKTT	Lembar	600	730	122%	
	Surat Keterangan Pindah Cabang	Lembar	24,000	33,745	141%	
	Outcome : Meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dalam,					
	KTP	Lembar	540,000	592,648	110%	
	KK	Lembar	312,010	302,010	97%	
	SKTT	Lembar	600	730	122%	
	Surat Keterangan Pindah datang	Lembar	24,000	33,745	141%	
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kelahiran dan Kematian	Input : Dana dan SDM	Rp	50,000,000	50,000,000	100%
		Output : Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	Akta	50,000	175,550	351%
Outcome : meningkatkan administrasi pencatatan sipil		Akta	50,000	175,550	351%	

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bogor, Data diolah penulis)

Tabel 6.
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengukuran capaian kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor apabila diukur dari Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan, menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor membutuhkan input berupa dana sebesar Rp350.000.000.000 dengan realisasi

sebesar 98% atau melebihi dari rencana dana yang ditetapkan, sedangkan dari segi pencapaian kinerja menunjukkan bahwa pencapaian untuk kartu tanda penduduk yang dicapai sebesar hanya sebanyak 592.648 lembar atau hanya sebesar 110%, kartu keluarga dengan realisasi sebesar 97% atau melebihi dari target yang ditetapkan, SKTT hanya sebanyak 122 % atau hanya sebanyak 730 lembar dan surat keterangan pindah datang sebanyak 33.745 lembar atau sebesar 141% pada tahun 2011.

Upaya dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam peningkatan pelayanan public dalam bidang administrasi kelahiran dan kematian membutuhkan masukan berupa dana sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 50.000.0000 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan, serta dengan pencapaian kinerja sebesar 351% atau mencapai 175.550 akta yang dibuat. Serta dalam upaya peningkatan pelayanan public dalam bidang administrasi perkawinan, perceraian, dan pengakuan pengesahan, dan pengangkatan anak membutuhkan dana sebesar Rp 23.994.000 dengan realisasi sebesar 100% serta jumlah akta sebesar 400 yang ditargetkan dengan realisasi sebesar 114% atau sebanyak 454 akta yang dibuat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor.

**Pengukuran Kinerja Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor Tahun 2012**

Kegiatan					
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	kependudukan secara terpadu				
	Input : Dana dan SDM	Lembar	11,275,203,000	8,302,099,165	74%
	Output : Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tersedia				
	KTP	Lembar	363,012	724,957	200%
	E – KTP	Lembar	3,459,297	2,414,483	70%
	KK	Lembar	617,846	480,915	78%
	SKTT	Lembar	785	906	115%
	Surat Keterangan Pindah Cabang	Lembar	36,000	45,465	126%
	Outcome : Meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dalam,				
	KTP	Lembar	363,012	724,957	200%
	E – KTP		3,459,297	2,414,483	70%
	KK	Lembar	617,846	480,915	78%
	SKTT	Lembar	785	906	115%
	Surat Keterangan Pindah datang	Lembar	36,000	45,465	126%
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kelahiran dan Kematian	Input : Dana dan SDM	Orang	50,000,000	50,000,000
Output : Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan		Akta	30,000	41,150	137%
Kematian	Outcome : meningkatkan administrasi pencatatan sipil	akta	30,000	41,150	137%

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bogor, Data diolah penulis)

Tabel 7.
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengukuran capaian kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor apabila diukur dari Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan, menunjukkan bahwa dinas

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor membutuhkan input berupa dana sebesar Rp8,302,099,165 dengan realisasi sebesar 74% atau sesuai dengan rencana penggunaan dana yang ditetapkan, sedangkan dari segi hasil pencapaian kinerja menunjukkan bahwa pencapaian untuk kartu tanda penduduk yang dicapai sebesar hanya sebanyak 724,957 lembar atau hanya sebesar 200%, tahun 2012, adanya program pembuatan elektronik kartu tanda penduduk yaitu dengan realisasi sebesar 2,414,483 lembar atau 77% dari target yang ditetapkan, kartu keluarga dengan realisasi sebesar 78% atau masih belum mencapai target yang ditetapkan, SKTT hanya sebanyak 115 % atau hanya sebanyak 906 lembar dan surat keterangan pindah datang sebanyak 45,465 lembar atau sebesar 146% pada tahun 2012.

Upaya dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam peningkatan pelayanan public dalam bidang administrasi kelahiran dan kematian membutuhkan masukan berupa dana sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 50.000.0000 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan, serta dengan pencapaian kinerja sebesar 351% atau mencapai 175.550 akta yang dibuat. Serta dalam upaya peningkatan pelayanan public dalam bidang administrasi perkawinan, perceraian, dan pengakuan pengesahan, dan pengangkatan anak membutuhkan dana sebesar Rp 23.994.000 dengan realisasi sebesar 100% serta jumlah akta sebesar 400 yang ditargetkan dengan realisasi sebesar 114% atau

sebanyak 454 akta yang dibuat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2011, maka evaluasi dan masing-masing sasaran dapat meningkatkan manajemen pencatatan sipil disajikan sebagai berikut :

**Pencapaian Sasaran Manajemen Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor Tahun 2010 s/d 2012**

2010					
No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	KTP	lembar	619,515	3,838,080	620%
2	KK	lembar	420,470	200,750	48%
3	SKTT	lembar	657	578	88%
4	Surat Keterangan Pindah Datang	lembar	13,136	21,009	160%
5	Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	lembar	85,000	141,500	166%
2011					
1	KTP	lembar	540,000	592,648	110%
2	KK	lembar	312,010	302,010	97%
3	SKTT	lembar	600	730	122%
4	Surat Keterangan Pindah Datang	lembar	24,000	33,745	141%
5	Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	lembar	50,000	175,550	351%
2012					
1	KTP	lembar	363,012	724,957	200%
2	E - KTP	lembar	3,459,297	2,414,483	70%
3	KK	lembar	617,846	480,915	78%
4	SKTT	lembar	785	906	115%
5	Surat Keterangan Pindah Datang	lembar	36,000	45,465	126%
6	Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	lembar	30,000	41,150	137%

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten bogor, Data diolah penulis)

Tabel 8.
**Pencapaian Sasaran Manajemen Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pencapaian sasaran pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam peningkatan pelayanan administrasi, dimana untuk pembuatan kartu tanda penduduk dan surat keterangan pindah datang pada tahun 2010 telah mencapai target yang ditetapkan, masing-masing mencapai 600% dan 160% dari rencana yang ditetapkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan diukur dari pembuatan kartu keluarga, menunjukkan realisasi sebesar 48% atau masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2011, menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dalam pembuatan kartu tanda penduduk telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 110%, meskipun terdapat adanya penurunan jika dilihat dari hasil pencapaian tahun sebelumnya. Selain itu, pencapaian pelayanan administrasi dalam pembuatan kartu keluarga pada tahun 2011, mencapai hasil sebesar 97%, yang mengalami peningkatan sebesar 49% dari tahun 2010. Serta pelayanan administrasi dalam pembuatan surat keterangan pindah datang menunjukkan peningkatan sebesar 191% dari tahun 2010, dimana pencapaian tahun 2011 mencapai 351%.

Pada tahun 2012, menunjukkan pencapaian pelayanan administrasi untuk pembuatan kartu tanda penduduk sebesar 200%, dimana terdapat adanya peningkatan pencapaian sebesar 90% dari tahun 2011. Sedangkan jika diukur dari pencapaian pelayanan administrasi dalam pembuatan kartu keluarga menunjukkan tidak

tercapainya target yang sudah ditetapkan, dimana hanya sebesar 78% realisasi dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga di kabupaten bogor. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan pencapaian dari tahun sebelumnya sebesar 19%. Selain itu, diukur dari pelayanan dalam pembuatan surat keterangan pindah datang menunjukkan pencapaian sebesar 261% dengan melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2012. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya penurunan pencapaian sebesar 94% dari tahun 2011.

Dalam memberikan pelayanan administrasi akta kelahiran dan kematian menunjukkan tingkat capaian yang melebihi target yang ditetapkan untuk setiap tahunnya, dimana pada tahun tahun 2010, tingkat capaian realisasi untuk pelayanan administrasi akta kelahiran dan kematian sebesar 166%, sedangkan tahun 2011 tingkat capaian realisasi untuk pelayanan administrasi akta kelahiran dan kematian sebesar 351%. Dan tahun 2012 menunjukkan tingkat capaian realisasi untuk pelayanan administrasi akta kelahiran dan kematian sebesar 137%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi akta kelahiran dan kematian yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sangat baik dilihat dari pencapaian atas target yang ditetapkan.

4.1.6. Efektifitas Pelayanan

Efektivitas bisa juga berarti pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan. Dalam pengukuran efektivitas, dapat dilihat atau diukur sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian atau realisasi sasaran yang dilakukan dibandingkan dengan tingkat anggaran atau target yang ditentukan atau ditetapkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor.

Pengukuran efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Sehingga pengukuran efektivitas pelayanan publik adalah sejauh mana pemerintah berhasil tidaknya memberikan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disajikan data mengenai pencapaian antara target dan realisasi dalam pelayanan publik dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor yaitu sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor Tahun 2010-2012**

2010					
No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Outcome
1	KTP	619,515	3,838,080	620%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
2	KK	420,470	200,750	48%	Belum Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
3	SKTT	657	578	88%	Belum Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
4	Surat Keterangan Pindah Datang	13,136	21,009	160%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
5	Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	85	141,5	166%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
2011					
1	KTP	540,000	592,648	110%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
2	KK	312,01	302,01	97%	Belum Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
3	SKTT	600	730	122%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
4	Surat Keterangan Pindah Datang	24,000	33,745	141%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
5	Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	50	175,55	351%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
2012					
1	KTP	363,012	724,957	200%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
2	E - KTP	3,459,297	2,414,483	70%	Belum Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
3	KK	617,846	480,915	78%	Belum Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
4	SKTT	785	906	115%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
5	Surat Keterangan Pindah Datang	36,000	45,465	126%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi
6	Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	30	41,15	137%	Tercapaiannya Upaya Peningkatan Pelayanan administrasi

Tabel 9.
Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2012

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan dalam pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara keseluruhan dinas

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor mampu merealisasikan keseluruhan dari target yang telah ditetapkan untuk pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten bogor. Akan tetapi, terdapat beberapa pelayanan yang belum tercapai secara maksimal antara lain dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga yang hanya mencapai 97%.

Sedangkan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan, khususnya pelayanan dalam pembuatan kartu tanda penduduk menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah mencapai target yang ditetapkan bahkan dapat merealisasikan lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 110%. Hal tersebut menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang kependudukan dapat tercapai, sehingga hasil atau outcome yang diharapkan sudah terealisasi dengan baik.

Selain dalam pembuatan kartu tanda penduduk, realisasi dengan hasil yang melebihi target yang ditetapkan terjadi dalam pelayanan SKTT dan pembuatan surat keterangan pindah datang dalam pelayanan kependudukan, dimana realisasi SKTT dan pembuatan keterangan pindah datang masing-masing sebesar 122% dan 141%. Hal ini menunjukkan tingkat pencapaian yang baik dan signifikan melebihi dari target yang ditetapkan dalam pelayanan di bidang kependudukan.

Diukur dari pemberian sosialisasi akan pelayanan kependudukan menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor merealisasikan secara keseluruhan proses sosialisasi pada 40 kecamatan yang terdapat di kabupaten bogor atau sebesar 100%. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan wawasan masyarakat akan pentingnya mengurus dan meningkatkan administrasi kependudukan, sehingga berdampak pada meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendapat pelayanan di bidang administrasi kependudukan baik dalam pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, SKTT maupun surat keterangan pindah datang.

Dalam hal pemeliharaan dokumen menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil memberikan pelayanan yang baik dengan merealisasikan lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 255%. Dimana dengan pemeliharaan dokumen kependudukan maka akan memberikan suatu pendataan yang baik dan sistematis, sehingga data kependudukan dapat berguna ketika diperlukan dalam waktu tertentu.

Serta dalam pelayanan administrasi untuk akta kelahiran dan kematian pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada kabupaten bogor menunjukkan bahwa adanya efektifitas pencapaian atas target yang ditetapkan, dimana realisasinya mencapai 351% pada tahun anggaran 2011. Sehingga dengan adanya peningkatan administrasi untuk akta kelahiran dan kematian dapat memberikan

suatu dampak positif dalam pendataan mengenai pertumbuhan penduduk di kabupaten bogor.

4.1.7. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sebagai Alat mengukur Efektifitas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini adalah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan suatu pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic yaitu satu tahun sekali pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor sesuai dengan tugas dan fungsi dinas, menetapkan visi dinas Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan. Selain itu, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor menetapkan misi tahun 2009 sampai 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen perkantoran.
2. Meningkatkan manajemen pelayanan dokumen kependudukan.
3. Meningkatkan manajemen pencatatan sipil.

Laporan kinerja instansi pemerintah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor mencakup rencana strategis, rencana kinerja tahunan, pengukurcapaian kinerja, evaluasi dan analisa kinerja serta akuntabilitas keuangan. Mengenai rencana

kinerja tahunan, pengukur capaian kinerja, evaluasi dan analisa kinerja serta akuntabilitas keuangan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada kabupaten bogor ditunjukkan sebagai berikut :

**Persentase Pencapaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
Tahun 2010-2012**

No	Indikator	2010			2011			2012		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	KTP	619,515	3,838,080	620%	540,000	592,648	110%	363,012	724,957	200%
2	E-KTP		-	-	-	-	-	3,459,297	2,414,483	70%
3	KK	420,470	200,750	48%	312,01	302,01	97%	617,846	480,915	78%
4	SKTT	657	578	88%	600	730	122%	785	906	115%
5	Surat Keterangan Pindah Datang	13,136	21,009	160%	24,000	33,745	141%	30	41,15	137%
6	Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	85	141,5	166%	50	175,55	351%	36,000	45,465	126%

Tabel 10.

**Persentase Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor Tahun 2010-2012**

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dengan tingkat penetapan target yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, hanya terdapat dua pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara keseluruhan realisasi dapat mencapai target yang ditetapkan. Akan tetapi, hanya terdapat 2 pelayanan yang tidak mencapai target yaitu pelayanan dalam hal pembuatan kartu keluarga dan elektronik kartu tanda penduduk, dimana kartu tanda penduduk yang mencapai 75% dan elektronik kartu tanda penduduk sebesar 70%. Pelayanan dalam pembuatan elektronik kartu tanda penduduk merupakan pelayanan dengan prosentase terkecil yang

dicapai pada tahun 2012, dimana dari target pembuatan elektronik kartu tanda penduduk sebesar 3.459.297 lembar, dengan tingkat pencapaian pelayanan elektronik kartu tanda penduduk 2.414.483 lembar. Hal tersebut menunjukkan bahwa, tidak tercapainya target pelayanan elektronik kartu tanda penduduk tahun 2012 sebesar 1.044.814 lembar atau sekitar 30% pelayanan elektronik kartu tanda penduduk yang tidak tercapai.

Tidak tercapainya pelayanan elektronik kartu tanda penduduk pada tahun 2012, memberikan indikasi bahwa belum tercapai secara penuh efektivitas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten bogor. Sedangkan diukur dari penggunaan dana yang digunakan menunjukkan bahwa masih terdapat 26% anggaran dana yang masih tersisa, atau hanya sebesar 74% anggaran dana yang digunakan dalam pelayanan elektronik kartu tanda penduduk. Anggaran dana untuk pelayanan kartu tanda penduduk dan elektronik kartu tanda penduduk adalah sebesar Rp 11.275.203.000, sedangkan realisasi yang digunakan untuk pelayanan elektronik kartu tanda penduduk hanya mencapai Rp 8.302.099.165. Dengan kelebihan dana yang belum digunakan, seharusnya dapat digunakan untuk memberikan pelayanan yang efektif dalam pembuatan elektronik kartu tanda penduduk.

Sehingga secara informatif dari laporan kinerja instansi pemerintah memberikan informasi dalam mengukur tingkat pencapaian realisasi pelayanan pada dinas kependudukan dan

pencatatan sipil kabupaten bogor. Secara keseluruhan dapat diukur informasi dari laporan kinerja instansi pemerintah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor telah efektif dalam hal merealisasikan target yang ditetapkan, meskipun terdapat pelayanan elektronik kartu tanda penduduk yang belum efektif dalam pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor.

4.2. Pembahasan dan Analisis

4.2.1. Penyusunan target tahunan (RKT) Pada Renstra Tidak Berdasarkan Survey yang matang

Berdasarkan pemaparan Data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil bahwa proses penetapan kinerja tahunan dalam menetapkan target yang akan capai tidak didasarkan pada renstra, didalam renstra dari Dinas kependudukan dan catatan sipil hanya menentukan target dalam bentuk pencapaian yang akan dicapai/persentase pencapaian akan tetapi Rencana kerja tahunan yang ditetapkan itu berdasarkan akumulasi permintaan belangko dari setiap kecamatan di Kabupaten bogor. Secara teori bahwa Rencana Kerja (Renja) / Program tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Restra) / Program lima tahun dan yang seharusnya sudah ada dalam renstra, sehingga dalam pencapaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik itu berupa target kinerja maupun anggaran yang telah ditetapkan. Jadi Pencapaiannya tidak terlalu melampaui dari target yang telah

ditetapkan atau kurang dari target yang telah ditetapkan karena hal tersebut akan mempengaruhi anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga dalam penentuan rencana strategis (Renstra) dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2009 sampai tahun 2013 perlu adanya penetapan rencana strategis yang sesuai atau searah dengan rencana kerja sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerja dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut ini rencana strategis (Renstra) dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2009 sampai tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
Tahun 2009 -2013**

No	Indikator Kerja Program dan Kegiatan	2009	2010	2011	2012	2013
1	KTP	317,888	338,188	348,604	359,202	369,798
2	E-KTP					369,798
3	KK	353,706	376,294	387,883	399,675	411,465
4	Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	20,351	21,621	22,440	23,282	20,425

**Tabel 11.
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013**

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa rencana strategis yang ditetapkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor tahun 2009 sampai tahun 2013 dalam hal pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) 317.888 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 20.300 orang, tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 10.416 orang dan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 10.596 orang. Selain itu,

dalam pelayanan kartu keluarga (KK) menunjukkan adanya peningkatan target setiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 peningkatan pelayanan kartu keluarga sebesar 22.578 orang, tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 11.590 orang dan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 11.790 orang. Sedangkan dalam pelayanan jumlah akte kelahiran menunjukkan pada tahun 2010 pelayanan jumlah akte kelahiran mengalami peningkatan sebesar 1.270 orang, tahun 2011 mengalami peningkatan pelayanan sebesar 819 orang dan tahun 2013 menetapkan pelayanan akte kelahiran sebesar 20.425 orang.

Dengan penetapan rencana kerja yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor memberikan indikasi dalam penetapan rencana kerja tahunan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor. Berikut ini rencana kerja tahunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor yaitu sebagai berikut :

**Rencana Kerja Tahunan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor
Tahun 2010 - 2012**

No	Indikator	Tahun		
		2010	2011	2012
1	KTP	619.515	540.000	363.012
2	E-KTP			3,459,297
3	KK	420.470	312.010	617.846
4	Akte Kelahiran dan kematian yang diterbitkan	85	50	36.000

Tabel 12.

**Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bogor Tahun 2010-2012**

Berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh dinas kependudukan dan pencatata sipil kabupaten bogor menunjukkan bahwa penetapan rencana kerja tahunan dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) pada tahun 2010 sebanyak 619.515 orang, penetapan rencana kerja tahunan tahun 2010 apabila dibandingkan dengan rencana strategis pada tahun 2010 sebanyak 338.188 orang, menunjukkan bahwa rencana kerja tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor. Sedangkan tahun 2011 menunjukkan target rencana kerja sebanyak 540.000 orang, dan rencana strategis tahun 2011 sebanyak 348.604 orang, dan rencana kerja tahun 2012 sebanyak 363.012 orang dengan rencana strategis tahun 2012 sebanyak 369.798 orang, rencana kerja tahun 2012 lebih kecil dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan tahun 2012, hal tersebut dikarenakan adanya pelayanan E-KTP yang direncanakan sebanyak 3,459,297 orang.

Rencana kerja tahun 2010 untuk kartu keluarga dengan rencana pelayanan sebanyak 420.470 orang dengan rencana strategis tahun 2010 sebanyak 376.294 orang, dimana rencana kerja yang ditetapkan tahun 2010 lebih tinggi dari rencana strategis yang ditetapkan. Tahun 2011, rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 312.010 orang dengan rencana strategis sebanyak 387.883 orang, dimana rencana kerja tahun 2011 lebih kecil dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan.

Rencana kerja tahun 2012 dalam pelayanan akte kelahiran sebanyak 36.000 orang, sedangkan rencana strategis dalam pelayanan akte kelahiran

pada tahun 2012 adalah sebanyak 23.282 orang, dengan demikian rencana kerja tahun 2012 lebih besar dari rencana strategis yang ditetapkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor.

Pencapaian Kinerja Yang Tidak Sesuai Target Yang Telah Ditetapkan

Untuk melihat tingkat pencapaiannya dapat dilihat dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai yaitu sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Tahun 2010-2012

No	Indikator	2010			2011			2012		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	KTP	619,515	3,838,080	620%	540,000	592,648	110%	363,012	724,957	200%
2	E-KTP		-	-	-	-	-	3,459,297	2,414,483	70%
3	KK	420,470	200,750	48%	312,01	302,01	97%	617,846	480,915	78%
4	SKTT	657	578	88%	600	730	122%	785	906	115%
5	Surat Keterangan Pindah Datang	13,136	21,009	160%	24,000	33,745	141%	30	41,15	137%
6	Jumlah akte kelahiran & kematian yg diterbitkan	85	141,5	166%	50	175,55	351%	36,000	45,465	126%

Tabel 13.

Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Tahun 2010-2012

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa pada tahun 2010 untuk realisasi pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) sangat melampaui dari target yang telah ditetapkan hingga mencapai 620% atau enam kali lipat dari target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pelayanan kartu keluarga (KK) hanya

mencapai 48%. Selain itu, pelayanan SKTT pada tahun 2010 mencapai tingkat realisasi sebesar 88% dari target yang ditetapkan, pelayanan akte kelahiran dan kematian yang diterbitkan mencapai tingkat realisasi sebesar 166% dari target yang ditetapkan pada tahun 2010. Berdasarkan realisasi yang dicapai tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) melebihi rencana kerja tahunan dan melebihi rencana strategis yang ditetapkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor. Akan tetapi, dalam hal penetapan rencana strategis yang dibuat, lebih kecil dari rencana kerja tahunan yang ditetapkan. Rencana kerja tahunan menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan rencana strategis, yang disebabkan dalam penetapan rencana kerja menggunakan akumulasi blangko dari setiap kecamatan, sehingga perlu adanya sinkronisasi antara rencana kerja tahunan dengan rencana strategis, ada keseimbangan penetapan antara rencana kerja dan rencana strategis sehingga dapat menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor. Dengan demikian dapat dilihat bahwa penetapan rencana kerja yang lebih tinggi dari pada rencana strategis akan mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dimana pencapaian dapat tidak mencapai target atau bahkan jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

4.2.2. Pelayanan dalam Pembuatan E-KTP yang tidak optimal dan tidak efektif

Berdasarkan data yang diperoleh untuk pembuatan E-KTP di kabupaten bogor pada tahun 2012 tidak mencapai target atau hanya

mencapai 70% dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan target yang di tetapkan sebanyak 3.459.297 dan dengan input Dana dan SDM sebesar Rp 11.275.203.000 (anggaran tahun 2012). Dari anggaran yang telah diberikan tersebut digunakan sebanyak Rp 8.302.099.165 atau 74% dari anggaran tahun 2012. Dengan melihat kondisi tersebut ada beberapa hal yang menyebabkan pencapaian target pembuatan E-KTP tidak tercapai secara optimal diantaranya :

1. SDM yang kurang memadai / jumlahnya sedikit,
2. Peralatan yang digunakan jumlahnya terbatas,
3. Proses pelaksanaan yang terlalu lama / waktu mengantri terlalu lama.

Sumber daya manusia yang kurang memadai atau jumlahnya sedikit itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelayanan yang diberikan sehingga dalam proses pendaftaran memakan waktu yang lama karena pegawai yang memverifikasi pendaftaran hanya dua orang, kemudian setelah melakukan pendaftaran masyarakat harus menunggu kembali untuk mendapat panggilan pemotretan, dan masyarakat harus menunggu kembali karena mesin foto dan sidik jari yang disediakan hanya tiga unit. Dengan sumber daya yang kurang memadai dan fasilitas yang terbatas berdampak terhadap waktu pelayanan dan pembuatan E-KTP yang memakan waktu lama mulai dari proses pembuatan sampai proses penerimaan E -KTP oleh masyarakat. Dari pemaparan permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan E-KTP tidak memberikan pelayanan yang tidak efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai laporan akuntabilitas instansi pemerintah sebagai alat mengukur efektivitas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor, dapat disimpulkan bahwa:

1. Laporan Akuntabilitas Instansi pemerintah disusun dengan penetapan rencana kerja tahunan, dimana penyusunan rencana kerja tahunan tidak berdasarkan survey yang matang, salah satunya diukur dari perencanaan KTP yang tidak valid atau tidak matang. Hal tersebut dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil bahwa proses penetapan kinerja tahunan dalam menetapkan target yang akan capai tidak didasarkan pada rencana strategis, didalam rencana strategis dari Dinas kependudukan dan catatan sipil hanya menentukan target didasarkan pada 70% dari persentasi jumlah penduduk atau dalam bentuk pencapaian yang akan dicapai/persentase pencapaian akan tetapi Rencana kerja tahunan yang ditetapkan itu berdasarkan akumulasi permintaan belangko dari setiap kecamatan di Kabupaten bogor. Hal tersebut berakibat rencana strategis tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dalam jangka

waktu 5 tahun kedepan dan adanya pengambilan anggaran yang berakibat pos lain tidak optimal.

2. Pencapaian kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor menunjukkan pencapaian dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk tahun 2012 mencapai 200% dari target yang ditetapkan, sedangkan pelayanan E-KTP hanya mencapai 70% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dalam pembuatan E-KTP dapat dikatakan tidak optimal dan tidak efektif, dimana tidak mencapai target atau hanya mencapai 70% dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan target yang di tetapkan sebanyak 3.459.297 dan dengan input Dana sebesar Rp 11.275.203.000 (anggaran tahun 2012). Dari anggaran yang telah diberikan tersebut digunakan sebanyak Rp 8.302.099.165 atau 74% dari anggaran tahun 2012. Dengan melihat kondisi tersebut ada beberapa hal yang menyebabkan pencapaian target pembuatan E-KTP tidak tercapai secara optimal diantaranya SDM yang kurang memadai atau jumlahnya sedikit, Peralatan yang digunakan jumlahnya terbatas, Proses pelaksanaan yang terlalu lama atau waktu mengantri terlalu lama. Sumber daya manusia yang kurang memadai atau jumlahnya sedikit itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelayanan yang diberikan sehingga dalam proses pendaftaran memakan waktu yang lama karena pegawai yang memverifikasi pendaftaran hanya dua orang, kemudian setelah melakukan pendaftaran masyarakat harus menunggu kembali untuk mendapat

panggilan pemotretan, dan masyarakat harus menunggu kembali karena mesin foto dan sidik jari yang disediakan hanya tiga unit. Dengan sumber daya yang kurang memadai dan fasilitas yang terbatas berdampak terhadap waktu pelayanan dan pembuatan E-KTP yang memakan waktu lama mulai dari proses pembuatan sampai proses penerimaan E -KTP oleh masyarakat. Dari pemaparan permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan E-KTP tidak memberikan pelayanan yang tidak efektif masih terdapat masyarakat yang belum memiliki E-KTP tetapi tetap menggunakan KTP lama. Sehingga dalam pelayanan pembuatan E-KTP menjadi optimal maka perlu dilakukan penambahan jumlah sumber daya manusia dalam hal pelayanan pembuatan E-KTP serta menambah peralatan yang digunakan. Selain itu, perlunya perubahan untuk mempersingkat waktu dalam pelayanan pembuatan E-KTP.

3. Laporan instansi pemerintah dapat dijadikan alat untuk mengukur efektivitas pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor, penyusunan laporan instansi pemerintah, baik dalam penyusunan rencana kerja tahunan, rencana strategis dapat memberikan pedoman kerja dalam upaya pencapaian pelayanan kepada masyarakat, semakin terarah dan semakin matang penyusunan rencana kerja, rencana strategis dalam laporan instansi pemerintah, akan memberikan arahan yang tepat dalam pencapaian kinerja pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian maka penulis mencoba mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan laporan akuntabilitas instansi pemerintah sebagai alat mengukur efektivitas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor, yaitu :

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

- 1.) Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor perlu melakukan dan menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis dengan menggunakan survey yang matang atau bekerja sama dengan BPS untuk mendapatkan data yang valid, sehingga dalam penyusunan rencana strategis dapat terarah dan dapat menjadi pedoman yang baik untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif.
- 2.) Perlu adanya ketaatan terhadap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga pengambilan anggaran dapat optimal sesuai dengan pos-pos yang ditetapkan.
- 3.) Agar laporan instansi pemerintah selalu dimonitoring dalam hal pencapaian yang diraih setiap tahunnya, sehingga selalu dapat dilakukan evaluasi yang tepat dengan tujuan meningkatkan secara berkesinambungan pelayanan kepada masyarakat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk menguji sejauh mana laporan instansi pemerintah dapat dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 2001. *Akuntansi Pemerintah Edisi Empat*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Deddi Nordian dan Ayuningtyas Hertianti, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan praktik pemerintah dan otonomi daerah*, PT Grasindo, Jakarta
- Haryatmoko, 2007. *Etika komunikasi, manipulasi, kekerasan dan pornografi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hery, S.E., M.Si. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- I Gusti Agung Rai, 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik : Konsep, Praktik dan Studi Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- IBK Bayangkara. 2008. *Management Audit Prosedur dan Implementasi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Indra Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Indra Bastian, 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Indra Bastian, 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Irham Fahmi, 2012. *Analisis Laporan Keuangan*, CV Alfabeta, Bandung.
- Islahuzzaman. 2012. *Istilah-istilah Akuntansi & Auditing*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lili M Sadeli, 2009. *Dasar-dasar Akuntansi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, CV Andri Offset, Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, BFTE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhammad Fadel, 2008. *Reinventing local government*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Payaman J Simanjuntak, 2011. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja : Edisi 3*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- SAP. 2007. PSAP No. 1 *Tentang Penyajian Laporan Laporan Keuangan*. Buku Kita, Jakarta.
- Soekrisno Agoes., 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Soemarso S.R. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi 5, Salemba, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 15, 2007. *Badan Pemeriksa Keuangan, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta.

JADWAL PENELITIAN

NO.	KEGIATAN	BULAN						
		Sept 2013	Okt 2013	Nov 2013	Juli 2014	Agst 2014	Sept 2014	Okt 2014
1	Pengajuan Judul	**						
2	Studi Pustaka	**	*					
3	Pembuatan Makalah Seminar		***					
4	Seminar			*				
5	Pengesahan			*				
6	Pengumpulan Data *)			**	**			
7	Pengolahan Data				**			
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan					**	**	
9	Sidang Skripsi							*
10	Penyempurnaan Skripsi							*
11	Pengesahan							*

*) : Pengumpulan data sekunder tanpa melakukan observasi lapangan.

* : Menunjukkan satuan unit waktu minggu dalam bulan.